



**PUTUSAN
Nomor 1006/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2678/PJ./2019, tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PELAYARAN KARYA CITRA DANAU KALIMANTAN INDONESIA, beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakili oleh Vinsensius, jabatan Direktur PT Pelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia,

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117970.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Membatalkan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117970.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PT Pelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP 02.188.874.8-037.000, beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| No | URAIAN | (Rp) |
|----|---|---------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak : | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | 0,00 |
| | a.1. Ekspor | 0,00 |
| | a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 36.500.000,00 |
| | a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN | 0,00 |
| | a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 36.500.000,00 |
| | a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | |
| | a.6. Jumlah | |

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2020



| | | |
|---|--|-----------------------|
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 36.500.000,00 |
| | c. Jumlah Seluruh Penyerahan | |
| 2 | Perhitungan PPN Kurang Bayar: | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 0,00 |
| | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar | 0,00 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan | 0,00 |
| 4 | PPN yang kurang dibayar | 0,00 |
| 5 | Sanksi administrasi | 0,00 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juli 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117970.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117970.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa September 2011 Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PT Pelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP 02.188.874.8-037.000, beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PT Pelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP: 02.188.874.8-037.000, beralamat di Jalan A.M. Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.188.874.8-037.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp36.500.000,00 atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Air yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form*



yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp36.500.000,00 atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Air yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaan kewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-2640/AL58 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 25 Oktober 2002. Dengan adanya SIUPAL tersebut membuktikan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa dibebaskan dari PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | (Rp) |
|----|--|---------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak : | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | 0,00 |
| | a.1. Ekspor | 0,00 |
| | a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 0,00 |
| | a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN | 36.500.000,00 |
| | a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 0,00 |
| | a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 36.500.000,00 |
| | a.6. Jumlah | |
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
| | c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 36.500.000,00 |
| 2 | Perhitungan PPN Kurang Bayar: | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 0,00 |
| | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar | 0,00 |



| | | |
|---|--|------|
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan | 0,00 |
| 4 | PPN yang kurang dibayar | 0,00 |
| 5 | Sanksi administrasi | 0,00 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 0,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)